

PROSES KOMUNIKASI DALAM COLLABORATIVE GOVERNANCE : PENGELOLAAN LIMBAH SAWIT PT SOCFINDO NAGAN RAYA

Nurasma Aripin¹, Fenni Rosita²

1,2 Program Ilmu Administrasi Negara Universitas Teuku Umar

Abstract

This study aims to understand the collaborative governance process in managing palm oil industry waste at PT Socfindo Seumayam. The research method uses a descriptive qualitative approach with data collected through in-depth interviews, observations, and document studies. The data analysis techniques include data reduction, data presentation, and drawing conclusions based on collaborative governance theory. The results show that the collaborative governance communication process has led to significant improvements in waste management, marked by better infrastructure, compliance with regulations, and increased trust and understanding between the company, the government, and the community. The communication process in effective collaboration involves face-to-face dialogue, building trust, commitment to the process, sharing understanding, and achieving interim results, according to Ansell and Gash (2008). This study concludes that the communication process in collaborative governance is an effective approach in managing palm oil industrial waste, emphasizing the importance of transparency, accountability, and commitment from all parties involved.

Keywords

(Communication Process, Collaborative Governance, Waste Management, Palm Oil Industry)

Email

Nurasmaaripin@utu.ac.id,
fennyrosita4@gmail.com

PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia yang digunakan dalam interaksi sosial sehari-hari. Dalam dunia kerja, komunikasi menjadi faktor penentu dalam kelancaran operasional suatu organisasi (Goldhaber, 2017). Dalam teori komunikasi yang dikemukakan oleh Katz dan Kahn menyatakan bahwa komunikasi organisasi adalah pertukaran arus informasi yang terjadi di dalam organisasi, yang melibatkan pertukaran pesan dan pemindahan arti di antara anggota organisasi (Katz & Kahn, 2019). Berdasarkan pernyataan tersebut maka komunikasi yang terjadi di organisasi bersifat dua arah yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi yang terjadi di dalam tubuh organisasi itu sendiri, antara anggota organisasi, baik antara atasan dan bawahan (vertikal) maupun antar rekan kerja (horizontal) itulah komunikasi internal. Sedangkan komunikasi yang melibatkan interaksi dengan pihak luar organisasi, seperti stakeholders yang terdiri dari pemerintah, pelanggan, mitra kerja, atau masyarakat umum (Fernando & Mukrodi, 2025).

Keberhasilan komunikasi organisasi dapat tercapai ketika proses komunikasi berjalan. Proses komunikasi di dalam organisasi melibatkan banyak unsur, seperti pengirim pesan (komunikator), isi pesan (pesan itu sendiri), dan penerima pesan (komunikan), semua faktor ini saling berkaitan dan mempengaruhi keberhasilan komunikasi yang terjadi (Fernando & Mukrodi, 2025). Dalam penelitian ini yang mengkaji mengenai pengelolaan limbah sawit PT Socfindo Nagan Raya melihat terjadinya komunikasi antar berbagai pihak yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup dari unsur pemerintah yang memiliki kewenangan atas izin industri dan pengawasan PT Socfindo sebagai

unsur swasta penghasil limbah, aparat gampong sebagai unsur pemerintah setempat lokasi keberadaan PT Socfindo dan masyarakat umum. Semua unsur ini dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan limbah yang aman, melakukan kerjasama antar organisasi yang dikenal sebagai *Collaborative Governance*. Sinergi antar lembaga dalam berkolaborasi tidak bisa lepas dari proses komunikasi dan dipayungi oleh konsep kemitraan. Kemitraan adalah interaksi kerja sama di antara para pemangku kepentingan. Semua pemangku kepentingan berproses dengan membawa kepentingan masing-masing berdasarkan tupoksi organisasi mereka dalam mencapai tujuan bersama dan diatur dengan pengaturan kolaboratif (Rejeki & Negoro, 2022).

Pengelolaan limbah sangat penting dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga pencemaran lingkungan tetap menjadi isu utama dalam permasalahan lingkungan saat ini. Keberadaan limbah adalah konsekuensi tak terhindarkan dari aktivitas manusia, karena setiap kegiatan yang dilakukan pasti menghasilkan limbah (Kuswoyo & Ulimaz, 2022). Sebagai negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia (Pratiwi et al., 2021). Indonesia menghadapi tantangan yang sangat besar dalam mengelola dampak lingkungan yang dihasilkan oleh industri ini utamanya industri minyak kelapa. Ekspansi industri kelapa sawit yang pesat, seperti yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, meningkatkan potensi pencemaran lingkungan jika pengelolaan limbah tidak dilakukan secara optimal (Parliansyah et al., 2022). Pada Tahun 2018, sungai Nagan Raya diduga terindikasi tercemar, karena ikan-ikan di sungai tersebut mati dan terapung di atas permukaan air sungai, seperti dilansir dari media Antara News (2018).

Kabupaten Nagan Raya dengan lahan perkebunan kelapa sawit yang terus bertambah menjadi representasi dari dinamika pertumbuhan industri ini dan konsekuensi lingkungannya. PT Socfindo Seumayam sebagai salah satu perusahaan kelapa sawit tertua di Indonesia yang beroperasi di Nagan Raya sejak 1936, memiliki peran penting dalam perekonomian daerah, memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah dan lapangan kerja. Namun, perusahaan ini juga berpotensi menghasilkan limbah dalam jumlah besar yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan masalah lingkungan yang serius (Mulyanto et al., 2023).

Pengelolaan limbah industri kelapa sawit yang tidak tepat dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat (Dharma et al., 2022). Limbah cair kelapa sawit (POME) mengandung senyawa organik yang tinggi yang jika dibuang langsung ke lingkungan tanpa pengolahan yang memadai dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah (Pratiwi et al., 2021). Pembuangan limbah ke sungai seperti yang diduga terjadi di Sungai Seumayam oleh PT Socfindo Seumayam, dapat mengganggu ekosistem sungai mengurangi kadar oksigen terlarut yang penting bagi kehidupan akuatik (Zidhan et al., 2023). Fenomena tersebut merusak mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sungai untuk perikanan dan sumber air bersih, dan menyebabkan masalah kesehatan seperti iritasi kulit, diare, dan penyakit lainnya. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif dan pengelolaan limbah yang berkelanjutan sangat penting untuk mencegah dampak negatif yang lebih besar (Gultom et al., 2023). Fakta lapangan yang pernah terjadi pada kasus PT Lapindo. Semburan lumpur panas dari pengeboran PT Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 2006 menyebabkan masalah pencemaran lingkungan yang kompleks di area Lapindo. Kasus Lapindo mengingatkan kita akan pentingnya tindakan pencegahan dan pengelolaan risiko yang cermat dalam setiap aktivitas industri.

Collaborative governance menjadi pendekatan yang semakin relevan dalam pengelolaan lingkungan (Adianto & Prayuda, 2018). Pendekatan ini muncul sebagai respon

terhadap kompleksitas permasalahan lingkungan yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak atau sektor. Dalam penyelesaian permasalahan lingkungan tersebut semua pihak melakukan proses komunikasi melalui pendekatan kolaboratif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses komunikasi *collaborative governance* diterapkan dalam pengelolaan limbah industri kelapa sawit PT Socfindo Seumayam. Penelitian ini akan mengidentifikasi proses komunikasi, aktor-aktor yang terlibat, peran dan tanggung jawab masing-masing aktor, mekanisme kerjasama yang digunakan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan *collaborative governance* dalam mencapai tujuan pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan limbah industri kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya.

KAJIAN TEORITIK

Proses Komunikasi

Komunikasi adalah suatu seni yang menggambarkan proses penyampaian segala informasi dimana para pelaku komunikasi saling memahami baik komunikan dan komunikator (Suprpto, 2017). Pola komunikasi yang dilakukan oleh setiap individu akan berbeda tergantung pada faktor yang mempengaruhinya. Komunikasi adalah proses yang dinamis dan secara konstan berubah sesuai dengan situasi yang berlaku (Syaiful Rohim, 2016). Sarana agar terjalin hubungan antar orang adalah komunikasi, dengan adanya komunikasi maka terjadilah hubungan sosial, sebagaimana manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri (Aripin et al., 2024). Dalam proses komunikasi Tempat, waktu, alat, situasi kondisi serta lawan bicara merupakan hal yang sangat penting dalam komunikasi agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Komunikasi tidak hanya dilakukan secara pribadi tetapi juga secara organisasi. Menurut Wayne dan Faules komunikasi organisasi dibagi menjadi dua perspektif yaitu perspektif tradisional dan perspektif interpretif, Perspektif tradisional melihat komunikasi organisasi sebagai suatu proses yang bersifat fungsional dan objektif, di mana pesan disampaikan dengan tujuan yang jelas dan terstruktur. Sedangkan perspektif interpretif memandang komunikasi organisasi sebagai suatu proses terciptanya makna melalui interaksi antar individu dalam organisasi, yang melibatkan unsur subjektivitas dan interpretasi masing-masing orang terhadap pesan yang diterima (Wayne & Faules, 2019).

Peran kepemimpinan dalam komunikasi organisasi tidak bisa dipungkiri, Pemimpin dengan kemampuan komunikasi yang baik akan dapat mempengaruhi bawahannya untuk bekerja dengan lebih efektif dan produktif. Selain itu, kemampuan komunikasi pemimpin akan membantu kelancaran hubungan kerja dengan organisasi lain dalam kemitraan. Komunikasi yang buruk antara pemimpin dan bawahannya dan juga mitra dapat menyebabkan kebingungan, ketidakpastian, dan penurunan *income* dan hilangnya kepercayaan. Keterampilan komunikasi yang baik dapat memfasilitasi terciptanya iklim kerja yang positif di dalam dan luar organisasi dan mendukung tercapainya tujuan organisasi. Dalam pengelolaan limbah PT Socfindo Nagan Raya dibutuhkan kemampuan komunikasi yang baik antar stakeholder yang terlibat agar kerusakan lingkungan akibat limbah dapat diminimalisir dampaknya atau tidak terjadi.

Collaborative Governance

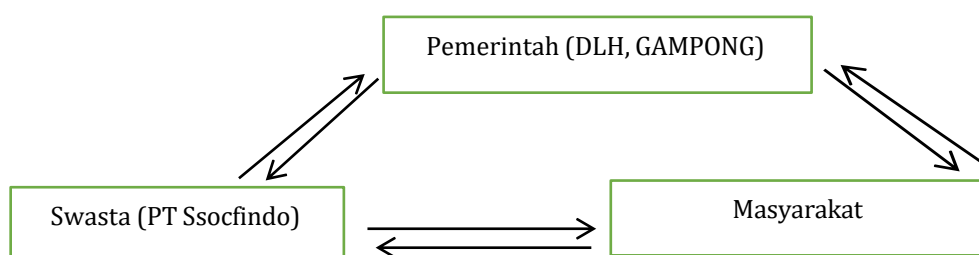
Pada dasarnya, konsep *collaborative governance* merujuk pada sebuah mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak, di mana lembaga pemerintah berinteraksi secara langsung dengan para pemangku kepentingan di luar ranah pemerintahan. Dalam praktiknya, *collaborative governance* menciptakan ruang dialog yang terstruktur dan formal, dengan tujuan utama mencapai konsensus melalui proses deliberatif. Proses ini tidak sekadar fokus pada

diskusi, melainkan bertujuan konkret untuk merumuskan atau mengimplementasikan kebijakan publik, serta mengelola program dan aset publik secara bersama-sama.

Dalam buku *Collaborative Public Management New Strategies For Local Governments* dijelaskan bahwa kolaborative governance merupakan bentuk pengelolaan publik yang melibatkan interaksi antara berbagai organisasi dan agen pemerintah dalam bentuk kemitraan untuk menyelesaikan masalah bersama. Teori ini menekankan pentingnya jaringan kolaboratif dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik (Agranoff & Mcguire, 2003). *Collaborative governance* merupakan pendekatan yang secara signifikan menekankan pada mekanisme kolaborasi sukarela dan hubungan setara antara berbagai aktor lintas sektor. Hal ini muncul sebagai respons terhadap kompleksitas tantangan yang sering kali melampaui kemampuan dan lingkup kerja sebuah organisasi publik tunggal (Vigoda-Gadot, 2004).

Pendekatan *Collaborative governance* menggambarkan sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik yang secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan nonpublik dalam proses pengambilan keputusan kolektif. Proses tersebut bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah, serta bertujuan membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik (Ansell & Gash, 2008). Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama (Eka et al., 2023). Dalam konteks pengelolaan limbah industri kelapa sawit *collaborative governance* dapat menjadi mekanisme untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan limbah melalui kerjasama antar pihak terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), perusahaan, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Melalui kolaborasi, sumber daya dan keahlian yang beragam dapat digabungkan untuk menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

Ansell & Gash menekankan beberapa tahapan penting, dalam Collaborative Governance dimulai dari kondisi awal yang melibatkan beragam *stakeholder*. Proses ini membutuhkan kemampuan komunikasi, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan yang efektif, serta proses kolaborasi yang meliputi dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen, berbagi pemahaman, dan mencapai hasil sementara. Teori ini memandang kolaborasi sebagai perjalanan bertahap yang sistematis, di mana setiap tahapan saling terkait dan berkontribusi pada keberhasilan kolaborasi secara keseluruhan. Teori ini memberikan kerangka kerja yang berguna untuk menganalisis dan memahami dinamika kolaborasi dalam pengelolaan lingkungan.



Gambar 2 Aktor Collaborative Governance

Teori proses kolaborasi menguraikan tiga tahapan kunci dalam membangun dan mengimplementasikan kolaborasi:

1. Dialog tatap muka

Bentuk *collaborative governance* pada hakikatnya dibangun melalui komunikasi interaktif antar pemangku kepentingan. Dialog menjadi fondasi esensial dalam proses kolaborasi, yang berfungsi sebagai mekanisme awal untuk membangun kesepahaman dan menciptakan kesepakatan bersama. Melalui dialog, para pihak yang terlibat berupaya mengeksplorasi potensi kerja sama dengan cara menggali dan mengungkapkan keuntungan yang dapat diperoleh secara mutual. Proses ini tidak sekadar pertukaran informasi, melainkan upaya strategis untuk membangun saling pengertian, menyamakan persepsi, dan merancang kerangka kerja yang mengakomodasi kepentingan seluruh pihak. Tujuan utama dialog dalam kolaborasi adalah menciptakan ruang yang memungkinkan setiap pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi peluang bersama, memahami perspektif masing-masing, serta merancang solusi yang memberikan manfaat optimal bagi semua pihak yang terlibat.

1. Membangun kepercayaan

Dalam membangun kepercayaan tidak dapat dipisahkan dari proses dialog. Adanya dialog dan komunikasi antar pemangku dapat membangun kepercayaan sehingga dapat berjalan secara maksimal. Proses dalam membangun kepercayaan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaannya dan memakan waktu (proses jangka panjang).

2. Komitmen pada proses kolaborasi

Para pemangku kepentingan memiliki kondisi saling ketergantungan dan tanggung jawab yang tinggi sehingga akan meningkatkan komitmen untuk berkolaborasi. Kolaborasi ini bukan hanya sekadar usaha satu kali jalan juga mencakup kegiatan kerja sama yang berkelanjutan yang saling menguntungkan.

3. Berbagi pemahaman

Pada tahap ini, para aktor yang terlibat harus saling berbagi informasi mengenai apa yang dapat dicapai bersama. Tahap ini mencakup tujuan yang jelas dalam bekerja sama, definisi yang jelas tentang masalah yang dipecahkan bersama, dan pemahaman tentang nilai yang akan dicapai kerja sama.

4. Hasil sementara

Kolaborasi akan cenderung berlanjut jika adanya hasil dan keuntungan dari kolaborasi dan dapat benar-benar dirasakan meskipun masih kecil hasil yang didapati dari proses kolaborasi tersebut. Sehingga hasil kecil ini dapat dijadikan sebagai pendorong dalam membangun kepercayaan dan komitmen bersama bagi pihak yang terlibat.

Esensi utama dari kolaborasi terletak pada komunikasi dan dinamika hubungan interdependensi antar aktor atau *stakeholder*. Kebutuhan akan kolaborasi lahir dari rasa saling ketergantungan yang kompleks, di mana setiap pihak memiliki peran, kepentingan, dan kontribusi yang saling melengkapi dalam upaya mencapai tujuan bersama. Dalam konteks *collaborative governance pengelolaan limbah sawit PT Socfindo Nagan Raya*, hubungan saling ketergantungan antar para aktor yang terlibat tidak sekadar bersifat formalitas administratif, melainkan merupakan mekanisme strategis untuk mengintegrasikan beragam perspektif, sumber daya, dan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholder*. Melalui pendekatan kolaboratif, perbedaan dan keterbatasan individual dapat dijumpai, sehingga memungkinkan tercipta solusi yang lebih komprehensif dan inovatif dalam menangani persoalan-persoalan publik. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan proses komunikasi yang baik.

Proses Komunikasi *Collaborative governance* yang efektif terhadap pengelolaan limbah industri kelapa sawit PT Socfindo Seumayam akan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan lingkungan, mengurangi dampak negatif limbah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan perusahaan.

Kepatuhan terhadap peraturan lingkungan adalah kunci untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pengurangan dampak negatif limbah akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga keberlanjutan ekosistem. Peningkatan kepercayaan masyarakat akan memperkuat legitimasi pemerintah dan perusahaan, serta menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk investasi dan pembangunan berkelanjutan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami bagaimana proses komunikasi dalam *collaborative governance* pengelolaan limbah industri kelapa sawit PT Socfindo Nagan Raya. Peneliti memilih pendekatan kualitatif agar memudahkan serta memungkinkan penggalian informasi mendalam mengenai fenomena yang diteliti, sementara metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis proses komunikasi *collaborative governance* serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Fokus utama penelitian adalah interaksi dan kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), perusahaan, masyarakat sekitar, dan pemerintah desa. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang dipilih melalui purposive sampling, meliputi perwakilan dari DLHK Nagan Raya, manajemen PT Socfindo Seumayam, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemerintah desa. Selain wawancara, observasi lapangan dan studi dokumentasi juga dilakukan untuk memperkuat data primer. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan grafik, serta penarikan kesimpulan berdasarkan kerangka teori *collaborative governance* dan studi relevan sebelumnya. Validitas data diuji melalui triangulasi, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan metode

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi dalam Dialog Tatap Muka

Kolaborasi diawali dengan dialog tatap muka antara PT Socfindo Seumayam, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nagan Raya, pemerintah gampong, dan masyarakat. Pertemuan pertama dilakukan oleh pihak PT Socfindo selaku perusahaan yang hasil industrinya menghasilkan limbah dan pihak pemerintah yaitu DLH Nagan Raya selaku lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan atas pengelolaan lingkungan hidup. Pertemuan awal ini merupakan langkah awal dari proses kolaborasi dengan pemerintah.

“Bahwa kami pihak perusahaan ini telah lama melakukan kerja sama dengan pihak pemerintah, baik dari kementerian hingga sampai turunan Dinas Lingkungan Hidup Nagan Raya, dari awal berdirinya perusahaan dan dioperasikan perusahaan ini. Sebagaimana aturan yang berlaku di Kabupaten Nagan Raya ini” (R, Teknisi II, 25 Oktober 2024)

Pihak Pemerintah membenarkan bahwa PT Socfindo telah melakukan komunikasi ke pihak pemerintah dalam rangka operasional perusahaan dan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan limbah sawit.

“Pertemuan awalnya di kantor ini, Pihak perusahaan PT Socfindo Seumayam mendatangi secara langsung kantor Dinas Lingkungan Hidup Nagan Raya dan kedatangan penanggung jawab perusahaan, kami pun menyambut dengan hangat” (CA, Kabid Pengawasan DLH Nagan Raya, 27 Oktober 2024)

DLH Nagan Raya mewajibkan pengawasan terhadap operasional perusahaan, memfasilitasi kolaborasi dengan perusahaan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Cut Aina selaku Kabid

Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya

“Setiap perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Nagan Raya diwajibkan adanya pengawasan, dan untuk mempermudah jaringan ini kami (Dinas Lingkungan Hidup kab Nagan Raya) dan pihak perusahaan melakukan kolaborasi”(CA, 27 Oktober 2024)

Kolaborasi ini telah lama terjalin antara DLH dan PT Socfindo Seumayam karena faktor pengawasan perusahaan. Dialog tatap muka menjadi sarana komunikasi vital bagi para pemangku kepentingan. Melalui dialog ini, peluang dan tantangan diidentifikasi, serta keuntungan dan kelemahan dari tujuan bersama dievaluasi. Proses ini memungkinkan para pihak untuk mengenali dan menganalisis peluang serta tantangan yang ada, sekaligus mengevaluasi keuntungan dan kelemahan yang timbul dari tujuan yang ingin dicapai bersama. Dialog ini tidak hanya terbatas pada pertemuan formal, tetapi juga mencakup komunikasi informal sehari-hari antara para pihak terkait.

Keuchik Gampong Simpang Deli Kilang dan masyarakat menyatakan kurangnya pengetahuan tentang awal mula kerjasama ini, meskipun mereka mengetahui bahwa DLH sering memberikan sosialisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat Simpang Deli Kilang ‘Kalau dalam kerja sama tersebut saya tidak dilibatkan cuman kami sebagai masyarakat hanya melaporkan ketika ada penyimpangan yang dilakukan perusahaan kepada *Keuchik*’. (F, 26 Oktober 2024)’. Komunikasi collaborative yang dibangun diawal secara formal hanya melibatkan dua aktor, pemerintah desa dan masyarakat berada pada pihak yang mengetahui secara langsung dan tidak langsung.

Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi mengenai inisiasi kolaborasi perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai tujuan dan manfaat kolaborasi. Bentuk kerjasama yang terjalin melibatkan DLH dalam pemantauan dan pengawasan perusahaan, sementara PT Socfindo Seumayam melaporkan kondisi lapangan. Keuchik berperan sebagai penerima aduan masyarakat, yang selaras dengan temuan Ansell dan Gash (2007) bahwa kolaborasi efektif melibatkan peran berbeda dari setiap aktor. Komunikasi yang baik menjadi fondasi untuk mencapai kesepakatan dan menghindari potensi konflik yang dapat menghambat kemajuan kolaboratif. Komunikasi yang efektif juga membantu membangun kepercayaan dan saling pengertian antara para pihak terkait.

Pertemuan awal kerjasama diinisiasi oleh PT Socfindo Seumayam yang mendatangi DLH Nagan Raya. Temuan ini menyoroti pentingnya inisiatif dari sektor swasta dalam membangun kolaborasi. Inisiatif ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan bersedia untuk bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Komunikasi yang dibangun dalam proses awal dialog tatap muka berperan sebagai inti dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati, dan pengertian di antara para pihak yang terlibat. Kehadiran dialog tatap muka menciptakan ruang bagi pemangku kepentingan untuk saling memahami perspektif masing-masing dan membangun komitmen terhadap proses kolaborasi. Komitmen ini menjadi dasar untuk membangun kerjasama yang lebih erat dan berkelanjutan.



Gambar. 3 Pertemuan PT Socfindo dan DLH Nagan Raya Sumber : DLH Nagan Raya

Komunikasi dalam Membangun Kepercayaan

Kolaborasi antara PT Socfindo dengan DLH Nagan raya tidak hanya berhenti di dialog tatap muka awal tetapi terus berlanjut selama operasional PT Socfindo. Selama PT Socfindo beroperasi maka limbah industri akan terus dihasilkan maka pengelolaan limbah sawit harus terus diawasi oleh pihak berwenang dan masyarakat. Pengawasan oleh DLH tidak dapat dilakukan setiap hari dan setiap bulan, oleh karena itu peran masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Pengawasan masyarakat dapat dilakukan dengan melakukan pengaduan kepada pihak pemerintah setempat dan pemerintah setempat yang akan menindaklanjuti laporan pengaduan ke pihak DLH Kabupaten.

“Banyak sekali aduan disertai keluhan dari masyarakat gampong tentang terjadinya pencemaran sungai ini, sehingga saya sebagai *Keuchik* Gampong berinisiatif melaporkan hal yang selama ini kami rasakan kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya ” (SE, 26 Oktober 2024)

Dalam kolaborasi yang terjalin PT Socfindo Seumayam berupaya membangun kepercayaan dengan menaati peraturan. Kepatuhan terhadap peraturan merupakan salah satu cara untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. *Keuchik* menyatakan pernah melihat bukti kerjasama, sementara masyarakat mengklaim perusahaan selalu menyatakan ketaatan pada peraturan. Pembangunan kepercayaan menjadi semakin krusial dalam situasi yang penuh tantangan. Upaya untuk membangun kepercayaan tetap harus menjadi prioritas utama. Dalam konteks kolaborasi, kepercayaan berfungsi sebagai fondasi yang memungkinkan semua pihak untuk bekerja sama secara efektif, mengatasi perbedaan, dan mencapai tujuan bersama. Tanpa kepercayaan, kolaborasi akan sulit untuk dipertahankan dan mencapai hasil yang diharapkan.

Kepercayaan sempat terganggu akibat pelanggaran aturan oleh PT Socfindo Seumayam pada tahun 2019-2021, yang menyebabkan pencemaran sungai. Kejadian ini menunjukkan bahwa membangun kepercayaan membutuhkan waktu dan upaya yang berkelanjutan, dan dapat rusak akibat tindakan yang tidak bertanggung jawab. *Keuchik* dan masyarakat melaporkan masalah ini ke DLH. Laporan ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran akan hak-hak mereka dan berani untuk menyampaikan keluhan jika terjadi pelanggaran lingkungan. Dialog tatap muka kembali dilakukan untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti laporan tersebut. Namun, jika hanya diadakan ke PT Socfindo, masyarakat dan pemerintah gampong setempat tidak puas karena tanggapan mereka menyerahkan kewenangan kepada pihak DLH Nagan Raya.

“Aparatur dan perwakilan masyarakat mengunjungi perusahaan itu dengan bertujuan untuk meminta bertanggung jawaban atas pencemaran sungai dan meminta solusi ke pada perusahaan namun pihak perusahaan mengatakan bahwa mereka sudah melakukan kerja sama dengan pihak pemerintah sehingga segala sesuatu yang terjadi sudah dan akan diurus oleh pemerintah (Sebari menunjukkan sertifikasi Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO)”. (F, 26 Oktober 2024)”

Komunikasi yang terbentuk sebelumnya dalam membangun kepercayaan antar sektor cenderung lemah karena PT Socfindo lebih menekankan membangun kepercayaan dengan pihak DLH. namun, kepada pihak pemerintah gampong dan masyarakat setempat tidak diajak berdialog secara khusus untuk menunjukkan tanggungjawab perusahaan terhadap pengelolaan limbah dan memastikan kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar bukan berasal dari perusahaan mereka.

Oleh karena itu kepercayaan masyarakat dan pihak gampong kurang terhadap PT Socfindo yang dilatarbelakangi komunikasi organisasi yang dilakukan tidak efektif. Komunikasi tidak berjalan dua arah karena PT Socfindo ketika masyarakat dan pemerintah setempat melakukan aduan, mereka selalu berdalih bahwa wewenang atas pengawasan pengelolaan limbah berada pada DLH Nagan Raya dan mereka sudah mematuhi aturan yang diberikan oleh DLH.

Komunikasi dalam Komitmen pada Proses Kolaborasi

Komitmen diwujudkan melalui surat perjanjian kolaborasi dalam pengawasan dan evaluasi pengelolaan limbah. Surat perjanjian ini menjadi bukti formal dari komitmen para pihak untuk bekerja sama dalam pengelolaan limbah. DLH pernah memutuskan kerjasama akibat pelanggaran aturan. Keputusan ini menunjukkan bahwa DLH serius dalam menegakkan peraturan lingkungan dan tidak akan mentolerir pelanggaran. Setelah memenuhi sanksi, kerjasama dilanjutkan kembali mulai tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan bersedia untuk memperbaiki kesalahan dan berkomitmen untuk mematuhi peraturan lingkungan di masa depan. Keuchik dan masyarakat mengakui adanya perubahan positif setelah pemberhentian sementara. Perubahan positif ini menjadi bukti bahwa kolaborasi yang efektif dapat menghasilkan perbaikan yang nyata dalam pengelolaan lingkungan. Komitmen merupakan motivasi yang mendorong setiap aktor untuk berpartisipasi aktif dalam tata kelola kolaboratif.

DLH melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung, dengan evaluasi 4-5 kali setahun. Pengawasan ini membantu memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan lingkungan dan melakukan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Kunjungan DLH ke perusahaan juga dikonfirmasi oleh pihak-pihak terkait. Komitmen merupakan fondasi yang membentuk kepercayaan dan sinergi dalam kolaborasi. Keterlibatan aktif dan konsisten dari semua pihak dianggap sebagai komponen penting untuk keberlanjutan kolaborasi. Keberlanjutan kolaborasi membutuhkan komitmen jangka panjang dari semua pihak terkait.

Komunikasi dalam Berbagi Pemahaman

PT Socfindo Seumayam melakukan transparansi dalam pengelolaan limbah. Transparansi menjadi media komunikasi tidak langsung PT Socfindo kepada masyarakat setda pemerintah gampong setempat yang secara aturan tidak dapat mengakses langsung laporan pengelolaan limbah yang telah dilakukan perusahaan tersebut. Transparansi membantu membangun kepercayaan dan memastikan bahwa semua pihak memiliki informasi yang sama mengenai pengelolaan limbah. DLH memberikan arahan dalam pengelolaan limbah industri. Arahan ini membantu perusahaan untuk memahami peraturan lingkungan dan melakukan pengelolaan limbah yang sesuai dengan standar yang berlaku. Keuchik menyatakan telah diberi tahu mengenai proses pengelolaan limbah, sementara masyarakat memahami kandungan limbah cair industri yang tidak membahayakan kesehatan. Pemahaman ini membantu mengurangi kekhawatiran masyarakat mengenai dampak limbah terhadap kesehatan mereka. Penting bagi semua *stakeholder* yang terlibat untuk saling berbagi pemahaman tentang apa yang dapat dicapai melalui kolaborasi tersebut. Saling berbagi pemahaman ini bertujuan untuk menciptakan suatu misi bersama yang dapat mengarahkan upaya kolektif ke arah tujuan yang diinginkan. Misi bersama ini menjadi panduan bagi semua pihak dalam menjalankan kolaborasi.

DLH memberikan pemahaman mengenai proses pengelolaan limbah yang benar. PT Socfindo Seumayam menyatakan telah mematuhi peraturan pemerintah. Kepatuhan terhadap peraturan pemerintah merupakan salah satu cara untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap

pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Keuchik mengetahui sekilas mengenai limbah, sementara masyarakat memahami kandungan limbah berdasarkan sosialisasi DLH. Memiliki tujuan yang sama, semua pihak dapat bekerja sama secara lebih efektif, berkontribusi dengan cara yang lebih terarah, dan meminimalisir potensi konflik yang mungkin muncul akibat perbedaan perspektif. Tujuan yang sama membantu menyelaraskan upaya semua pihak dan memastikan bahwa kolaborasi berjalan efektif.

Pembahasan

Kolaborasi menghasilkan perbaikan dalam pengelolaan limbah, yang dirasakan oleh semua pihak. Perbaikan ini menjadi bukti bahwa kolaborasi yang efektif dapat menghasilkan hasil yang nyata dan bermanfaat bagi semua pihak. PT Socfindo Seumayam menyatakan pengelolaan limbah jauh lebih baik dari sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan upaya yang signifikan untuk meningkatkan pengelolaan limbah mereka. DLH melihat perubahan positif dan ketaatan pada aturan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DLH efektif dalam mendorong perusahaan untuk mematuhi peraturan lingkungan. Keuchik menyatakan tidak ada lagi pelanggaran sejak 2023, dan masyarakat merasa tidak terganggu seperti tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi telah berhasil mengurangi dampak negatif limbah terhadap lingkungan dan masyarakat.

Dalam proses komunikasi *collaborative governance* pengelolaan limbah di Nagan Raya, DLH akan terus meningkatkan kerjasama, PT Socfindo Seumayam akan terus memberikan yang terbaik, Keuchik akan terus antusias, dan masyarakat akan lebih mengontrol komitmen pengelolaan limbah. Komitmen ini menunjukkan bahwa semua pihak berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan kolaborasi dan terus meningkatkan pengelolaan limbah. Semua pihak menginginkan keberlanjutan kerjasama ini. Proses komunikasi dalam kolaborasi yang terjalin telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam pengelolaan limbah. Penerapan prinsip-prinsip *collaboratif governance* telah berhasil, sejalan dengan kerangka teori yang diusulkan oleh Ansell dan Gash (2008). dimana setiap tahapan dalam proses kolaborasi diimplementasikan secara efektif. Proses komunikasi yang dilakukan dari setiap tahapan kolaborasi menjadi kunci keberhasilan pengelolaan limbah.

Hasil penelitian diatas mengindikasikan bahwa proses komunikasi *collaborative governance* dalam pengelolaan limbah industri di PT Socfindo telah membawa perubahan positif yang signifikan. Observasi lapangan menunjukkan peningkatan signifikan dalam infrastruktur pengelolaan limbah, seperti kolam limbah yang lebih memadai dengan kapasitas yang ditingkatkan, proses penyaringan yang optimal menggunakan teknologi terkini untuk menghilangkan zat-zat berbahaya, dan sistem pembuangan limbah yang lebih terarah dengan saluran yang dirancang untuk mencegah kebocoran dan pencemaran tanah. Peningkatan ini tidak hanya sekadar perbaikan fisik, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaan untuk meningkatkan standar pengelolaan lingkungan. Investasi dalam infrastruktur yang lebih baik menunjukkan bahwa perusahaan memandang pengelolaan limbah sebagai prioritas utama dan bersedia untuk mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mencapai tujuan tersebut.

Sejalan dengan peningkatan infrastruktur, PT Socfindo juga menunjukkan peningkatan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pelanggaran yang signifikan sejak tahun 2023, serta adanya upaya untuk memenuhi sanksi yang pernah diberikan akibat pelanggaran sebelumnya. Upaya ini mencakup pembayaran denda, perbaikan sistem pengelolaan limbah, dan pelatihan karyawan mengenai praktik pengelolaan lingkungan yang baik. Kepatuhan terhadap regulasi bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk

melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Kolaborasi yang terjalin antara PT Socfindo Seumayam, DLH, pemerintah gampong, dan masyarakat telah meningkatkan kepercayaan antara semua pihak. Peningkatan kepercayaan ini menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk kerjasama dan komunikasi yang efektif. Ketika semua pihak saling percaya, mereka lebih bersedia untuk berbagi informasi, berdiskusi mengenai masalah, dan mencari solusi bersama. Kepercayaan juga mengurangi potensi konflik dan meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Melalui sosialisasi dan dialog, masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan limbah industri dan dampaknya terhadap lingkungan. Pemahaman yang lebih baik ini memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan dan memberikan masukan yang konstruktif. Masyarakat yang terinformasi dengan baik dapat menjadi mitra yang berharga bagi pemerintah dan perusahaan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan

KESIMPULAN

Proses komunikasi *collaborative governance* dalam pengelolaan limbah industri di PT Socfindo Nagan Raya telah menunjukkan hasil positif yang signifikan. Komunikasi dan Kolaborasi yang efektif antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat menghasilkan perbaikan nyata dalam pengelolaan limbah dan meningkatkan kepercayaan antara semua pihak. Penelitian ini mendukung teori (Ansell & Gash, 2008) mengenai proses komunikasi dalam kolaborasi dan menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan komitmen dalam mencapai tujuan bersama. Proses komunikasi yang efektif dalam kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sangat penting dalam pengelolaan limbah industri. Melalui kerjasama ini, diharapkan pengelolaan limbah dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif, sehingga dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalisir. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam pengelolaan limbah, yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada aspek sosial dan lingkungan, untuk mencapai keberlanjutan yang diinginkan.

Penelitian ini memberikan kontribusi yang berharga bagi pemahaman mengenai proses komunikasi *collaborative governance* dalam pengelolaan lingkungan. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan pengelolaan limbah industri kelapa sawit di Indonesia. Namun, penelitian ini juga memiliki keterbatasan, seperti fokus pada satu studi kasus dan penggunaan metode kualitatif yang mungkin sulit untuk digeneralisasikan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan studi kasus yang lebih beragam untuk memperkuat validitas dan generalisasi hasil penelitian. Selain itu, penelitian selanjutnya juga perlu mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan *collaborative governance*, seperti budaya organisasi, kepemimpinan, dan dinamika politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adianto, A., & Prayuda, R. (2018). Collaborative Governance dalam Kebijakan Lingkungan (Studi Kasus Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit di Kabupaten Rokan Hulu). *Jurnal Good Governance*, 14(2). <https://doi.org/10.32834/jgg.v14i2.18>
- Dharma, B., Pratiwi, A. I., & Melati. (2022). Analisis Laporan Keuangan Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit Pada PT. Perkebunan Nusantara III Persero Labuhanbatu Selatan. *Jurnal Manjaemen Akuntansi (JUMSI)*, 2(3).
- Fernando, Louis., & Mukrodi. (2025). Peran Komunikasi dalam Organisasi: Konsep, Proses, Teknik, dan Faktor yang Mempengaruhi Efektivitasnya. *Anthronomics: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia Anthronomics: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 2(3), 134–

139.

- Goldhaber, G. (2017). *Organizational Communication: A Critical Introduction*. Pearson Education.
- Gultom, K., Kesehatan, I., Masyarakat, K., Ramadhani, S., Herdinda, S., & Hasibuan, A. (2023). Analisis Sistem Pengolahan Kelapa Sawit dan Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit di PT Perkebunan Nusantara IV Unit Dolok Ilir. *Cross-Border*, 6(2), 1167–1174.
- Katz, D., & Kahn, R. L. (2019). *The Social Psychology of Organizations*. New York: Wiley. Wiley.
- Kuswoyo, A., & Ulimaz, A. (2022). Pengaruh Jenis dan Ketebalan Karbon Aktif pada Sistem Constructed Wetlands untuk Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga. *Bioscientist : Jurnal Ilmiah Biologi*, 10(1), 173. <https://doi.org/10.33394/bioscientist.v10i1.4436>
- Mulyanto, A., Nasihin, I., Herlina, N., & Nurdin, N. (2023). Pengaruh Limbah Cair Kelapa Sawit terhadap Kualitas Air Tanah di PT Nusantara Sawit Persada. *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, 14(01), 74–79. <https://doi.org/10.25134/logika.v14i01.7667>
- Parliansyah, M. R., Maharani, H., & Sheilla, A. (2022). Upaya Pengawasan yang Dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tamiang terhadap Pengelolaan Limbah PT Socfindo. *Jurnal Biosense*, 5(2), 29–37. <https://doi.org/10.36526/biosense.v5i2.2094>
- Pratiwi, R., Aripin, S., Frenki Sianturi, C., & Sianturi, L. T. (2021). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Aternatif Pengelolaan Limbah kelapa Sawit Pada PT.Austindo Nusantara Jaya Agri Siais Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara Menggunakan Metode Analitic Network Process (ANP). *Bulletin Of Computer Science Research*, 1(2). <https://hostjournals.com/bulletincsr>
- Rejeki, N. S., & Negoro, S. H. (2022). Collaborative Governance dan Strategi Komunikasi Nilai-Nilai Organisasi dalam Membangun Landasan Kemitraan. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 19(1), 69–86. <https://doi.org/10.24002/jik.v19i1.4616>
- Zidhan, M., Legawati, L., & Haura Arnel, A. (2023). Optimalisasi Potensi Desa, Pengolahan Limbah Perkebunan Sawit Menjadi Briket Sebagai Energi Alternatif Yang Bernilai Ekonomi Tinggi. *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI*, 7(2), 274–277. <https://doi.org/10.37859/jpumri.v7i2.5782>